

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi dan kebijakan BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang didasarkan pada tujuan dan sasaran serta visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”**

Sedangkan Misi yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan

Analisis SWOT dari Program, Sasaran dan Strategi yang dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*) :

- 1) Peran Bappeda sebagai lembaga perencana sangat luas dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan;
- 2) Peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai;
- 4) Bappeda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- 1) Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai;
- 2) Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal;
- 3) Penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal
- 4) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia serta belum adanya fungsional perencana;
- 5) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan acuan bahan perencanaan selanjutnya ;
- 6) Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan

c. Peluang (*Opportunities*) :

- 1) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana
- 2) Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah semakin luas;
- 3) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi
- 4) Terdapatnya lembaga perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam kajian ilmiah bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Ketersediaan dokumen perencanaan dan pedoman/regulasi yang sedang berlaku tentang tata cara perencanaan pembangunan;
- 6) Tuntutan kompetensi aparatur perencana;
- 7) Ketersediaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik atau *e-planning*.

d. Ancaman (*Threats*) :

- 1) Adanya indikasi ketidakpedulian (skeptisme) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;
- 4) Lemahnya dukungan dari Perangkat Daerah dalam hal perencanaan

SDM

	PELUANG 1) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana 2) Tuntutan kompetensi aparatur perencana	ANCAMAN 1) Kualitas SDM tidak sesuai dengan kompetens/kebutuhan 2) Adanya insentif/tunjangan yang lebih tinggi dan kesempatan pengembangan diri di pemerintah daerah lain
KEKUATAN 1) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai		
KELEMAHAN 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia serta belum adanya fungsional perencana		

	<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana 2) Tuntutan kompetensi aparatur perencana 3) Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah semakin luas; 4) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi 5) Terdapatnya lembaga perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam kajian ilmiah bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah. 6) Ketersediaan dokumen perencanaan dan pedoman/regulasi yang sedang berlaku tentang tata cara perencanaan pembangunan 7) Ketersediaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik atau <i>e-planning</i> 	<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya indikasi ketidakpedulian (skeptisme) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan; 3) Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah; 4) Lemahnya dukungan dari Perangkat Daerah dalam hal perencanaan
<p>KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai 2) Peran Bappeda sebagai lembaga perencana sangat luas dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan 3) Peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah 4) Bappeda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 	<p>STRATEGI (S - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana 2) Meningkatkan akurasi dan validitas data melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten 3) Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung kegiatan di Bappeda 4) Meningkatkan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, dan pihak swasta 5) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan dalam penyusunan kajian perencanaan pembangunan yang aplikatif 6) Meningkatkan ketersediaan kajian dan produk hukum bidang penataan ruang 7) Mengoptimalkan peran dan fungsi BKPRD 	<p>STRATEGI (S - T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan) melalui penyelenggaraan Bimtek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan) 2) Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan Perangkat Daerah, TAPD dan lembaga legislatif. 3) Penyesuaian dengan perubahan regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan

KELEMAHAN	STRATEGI (W - O)	STRATEGI (W - T)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia serta belum adanya fungsional perencana 2) Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai 3) Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal; 4) Penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal 5) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan acuan bahan perencanaan selanjutnya ; 6) Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui pengiriman pegawai bappeda untuk mengikuti diklat fungsional 2) Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga. 3) Optimalisasi pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 4) Meningkatkan kualitas Data dan Dokumen Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan intensitas Sosialisasi Program/Pembangunan tahun berjalan

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappeda pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Oleh karena itu, masing-masing rencana program dan kegiatan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dijabarkan berdasarkan table 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan							
Misi : 3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan yang efektif dan efisien	1	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	1	Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	1	
				2	Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui pengiriman pegawai bappeda untuk mengikuti diklat fungsional	2	
		2	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai	1	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga	1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan
		4	Meningkatnya Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	1	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga	2	Peningkatan kedisiplinan aparatur
		5		1	Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja SKPD
				1	Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	1	Pelaksanaan In House Training bagi Perencana
2	Mewujudkan sistem informasi manajemen	1	Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dan	1	Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung	1	Pemanfaatan sistem Informasi Manajemen

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan						
Misi : 3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah		Komunikasi dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah		kegiatan di Bappeda	dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
				2	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan	2 Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi perencanaan pembangunan daerah
3	Mewujudkan keselarasan dan efektivitas perencanaan pembangunan	1	Terlaksananya keselarasan dan efektivitas perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lainnya, dan pihak swasta	1	Meningkatkan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, dan pihak swasta	1 Peningkatan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, dan pihak swasta
				2	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan dalam penyusunan kajian perencanaan pembangunan yang aplikatif	
4	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan	1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1	Meningkatkan kualitas Data dan Dokumen	1 Peningkatan Validitas Data Sebagai Basis

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan								
Misi : 3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)								
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
	Daerah yang Visioner dan Berkelanjutan		dan pengendalian Pembangunan Daerah		Perencanaan		Data perencanaan pembangunan	
				2	Optimalisasi pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	2	Peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	
Misi : 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan								
5	Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten	1	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	1	Perwujudan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang konsisten dan terpadu	1	Terciptanya ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan daerah	
		2	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten	1	Meningkatkan ketersediaan kajian dan produk hukum bidang penataan ruang	1	Penyediaan kajian dan produk hukum daerah bidang penataan ruang yang partisipatif dan berkualitas	
				2	Mengoptimalkan peran dan fungsi BKPRD	1	Peningkatan koordinasi pada forum BKPRD	
						2	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang	

